



**LAPORAN
KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI RIAU**

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2017-2018
13 – 15 MARET 2018**

**SEKRETARIAT KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

I. PENDAHULUAN

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai 105°05'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI kali ini adalah ke Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak ini terdapat salah satu dari 8 (delapan) Wilayah Kerja (Blok) Migas yang dimiliki Provinsi Riau, yaitu Coastal Plain Pekanbaru (CPP) yang dikelola oleh BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU. BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu mulai mengambil alih dan memproduksi sendiri sejak tanggal 19 Agustus 2002, yang sebelumnya di kelola oleh PT. Caltex Pacific Indonesia (PT CPI). Pada tahun 2015-2016 tercatat BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu selalu melampaui target lifting. Di 2015 14.025 barrel per hari dari target SKK Migas 13.170 barrel per hari, dan di 2016 12.855 barrel per hari dari target 12.343 barrel per hari.

Merupakan persepsi keliru yang mengatakan Indonesia negara kaya migas, sebagaimana dilansir dalam Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2016. Porsi cadangan dan produksi migas nasional dibandingkan dengan dunia:

- Cadangan terbukti minyak Indonesia yang tinggal 3,6 miliar barel (termasuk kondensat) hanya 0,2% dari total cadangan minyak dunia sebesar 1.684 miliar barel;
- Cadangan terbukti gas Indonesia sebesar 103 triliun standar kaki kubik ("Tscf") hanya 1,6% dari total cadangan gas dunia sebesar 6.559 Tscf;
- Produksi minyak Indonesia yang pada tahun 2016 berada di level rata-rata 831 ribu bopd hanya 0,9% total produksi minyak dunia yang berada di level 91,7 juta bopd. Produksi gas Indonesia yang pada tahun 2016 berada di level rata-rata 8,2 miliar kaki kubik per hari ("Bscfd") hanya 2,4% total produksi gas dunia yang berada di level 342,4 Bscfd.

Di negara kita Indonesia yang kita cintai ini, selain merupakan sumber pasokan utama kebutuhan energi nasional, hingga saat ini migas masih merupakan sumber pendapatan utama negara setelah pajak, sehingga ada parameter target sektor hulu migas dalam asumsi makro APBN. Secara kuantitas (volume), kebutuhan migas pun terus meningkat. Menurut proyeksi Dewan Energi Nasional ("DEN"), pada tahun 2015, dari total kebutuhan energi primer sebesar 166 juta setara ton minyak ("Mtoe"), 46% dipasok oleh minyak dan 23% oleh gas. Kebutuhan energi primer nasional pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 412 Mtoe, masih akan dipasok secara dominan oleh migas (25% minyak dan 22% gas).

Karena itulah, meski dengan keterbatasan kemampuan sumber migas kita dan adanya kebutuhan yang meningkat di sektor energi dari kebutuhan hanya setara 166 MTOE di 2015 menjadi 412 MTOE di 2025 dan akan menjadi 1.030 MTOE di 2050, maka perlu langkah strategis dalam mengatasi Gap tersebut. Strategi untuk meningkatkan produksi dan cadangan merupakan strategi yang diambil oleh SKK Migas dalam mengatasi Gap tersebut dan akan berhasil apabila regulasi dan perizinan mudah, tingkat keekonomian yang memadai bagi investor, didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten, serta memenuhi kaidah good governance dalam menjalankan tata kelola dan proses bisnis

Untuk itulah maka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu kali ini adalah untuk melihat secara langsung proses bisnis yang dilakukan.

II. DASAR HUKUM KUNJUNGAN

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
3. Keputusan Rapat Intern tanggal 5 November 2018 Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau adalah untuk melihat secara langsung proses bisnis yang dilakukan BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu sebagai perusahaan lokal yang mengelola Blok Migas CPP di Kabupaten Siak, yang sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), paling tidak dalam 3 (tiga) hal yaitu :

- a) Bagaimana kinerja pengelolaan bisnis setelah 19 Agustus 2002 dibandingkan pada saat dikelola PT CPI.
- b) Kontribusi BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu terhadap pendapatan daerah Kabupaten Siak secara khususnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerja
- c) Kontribusi BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu terhadap lifting migas nasional di 2015, 2016 dan 2017.

IV. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan WK CPP oleh BOB Bumi Siak – Pertamina Hulu yang merupakan kerjasama operasi antara PT Bumi Siak Pusako (BUMD Pemerintah Provinsi Riau dan PemKab Siak) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku agar bisa memberikan

manfaat yang optimal kepada masyarakat dan pemerintah, dan menerima masukan terkait aspirasi pemerintah daerah melalui PT Bumi Siak Pusako untuk tetap mendapat kesempatan mengelola WK CPP setelah 8 Agustus 2022.

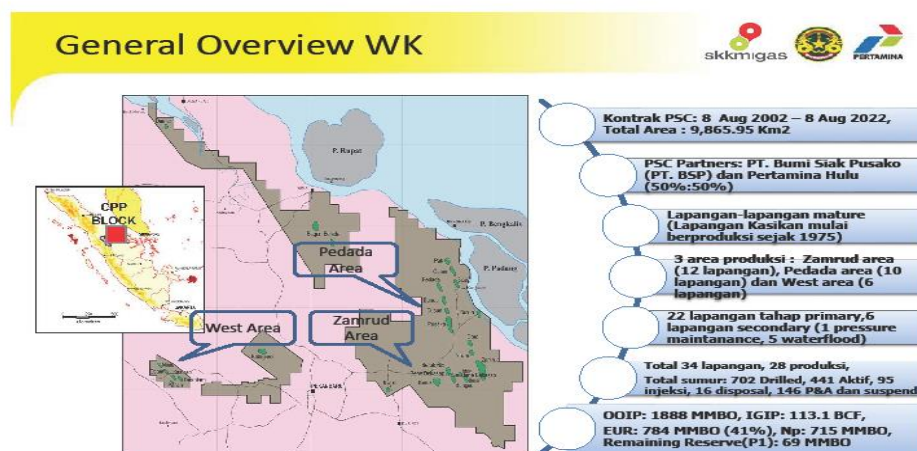
V. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan ke Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

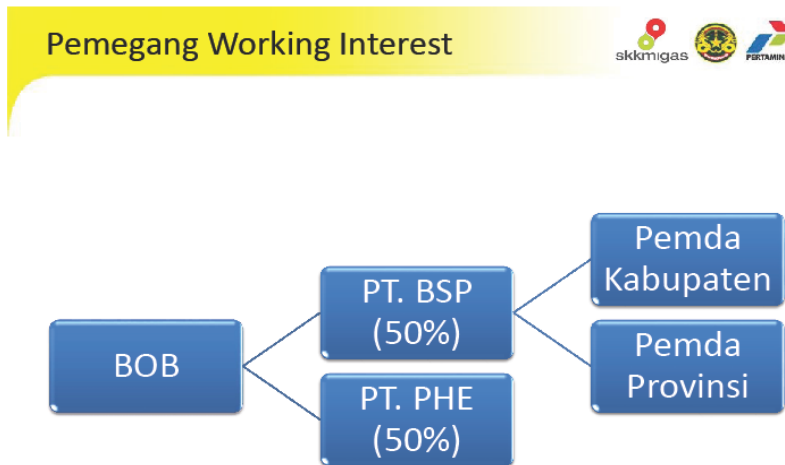
VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor project WK CPP yang dikelola BOB Bumi Siak – Pertamina Hulu. Dalam pertemuan tersebut Tim Kunker Komisi VII DPR diterima oleh Plt. Bupati Bumi Siak, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan International, Deputi Pengawasan Internal SKK Migas, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako, GM BOB Bumi Siak-Pertamina Hulu dan unsur muspida Kabupaten Siak serta jajaran manajemen BOB Bumi Siak-Pertamina Hulu. Secara keseluruhan, maksud dan tujuan yang direncanakan tercapai, yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :

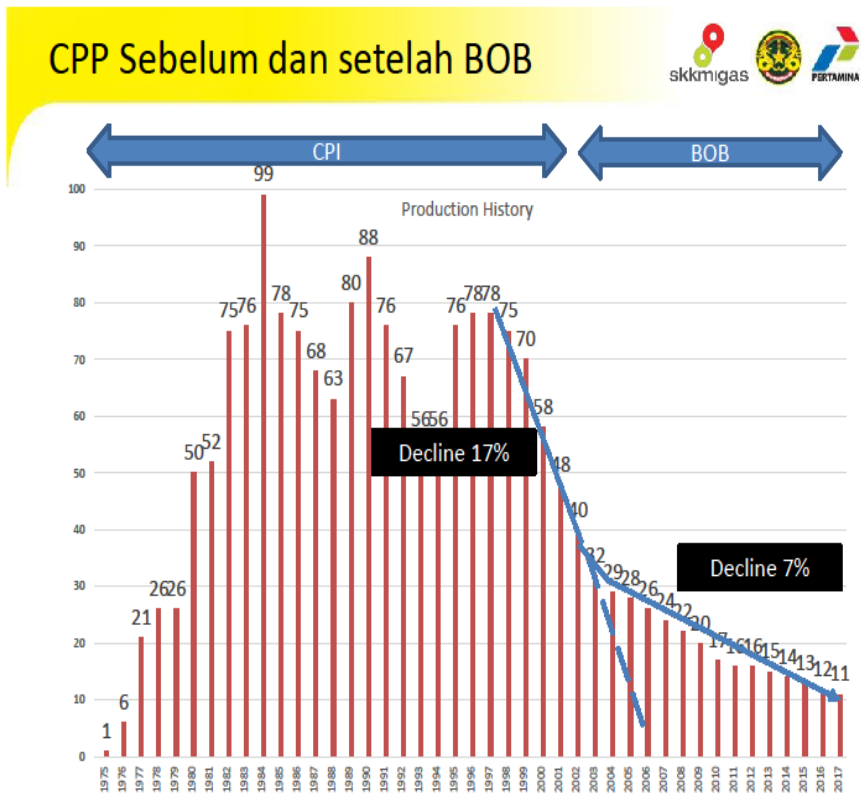
1. Kinerja pengelolaan bisnis setelah 19 Agustus 2002 dibandingkan pada saat dikelola PT CPI.
 - a) Gambaran Umum WK CPP (Zamrud Area, Pedada Area, West Area)



b) Pemegang Working Interest BOB Bumi Siak-Pertamina Hulu

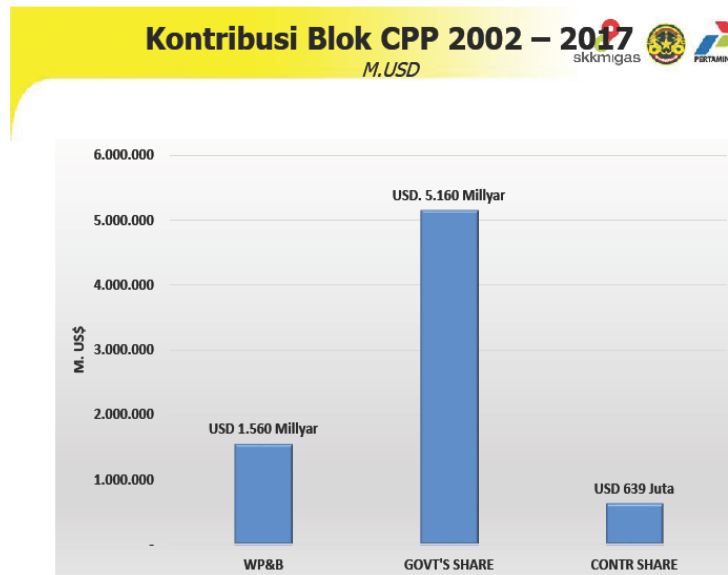


c) Perbandingan Produksi BOB versus CPI



2. Kontribusi BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu terhadap pendapatan daerah Kabupaten Siak secara khususnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerja

a) Kontribusi CPP Tahun 2002 – 2017




b) Kontribusi PT Bumi Siak Pusako kepada PemKab Siak

KONTRIBUSI PT. BSP KEPADA DAERAH

Dari hasil pengelolaan Blok CPP bersama PT Pertamina, PT BSP telah memberikan kontribusi positif dan material kepada pemegang saham PT BSP melalui pembagian deviden sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 yang mencapai Rp2,88 triliun (lihat tabel berikut).

NO	TAHUN	DEVIDEN (Rp)
1.	2002	60,000,000,000
2.	2003	138,247,305,911
3.	2004	88,782,534,135
4.	2005	133,065,521,419
5.	2006	462,671,622,978
6.	2007	312,230,475,716
7.	2008	337,686,478,434
8.	2009	137,546,569,847
9.	2010	131,604,734,742
10.	2011	263,969,691,428
11.	2012	275,394,995,688
12.	2013	221,155,791,473
13.	2014	236,421,272,605
14.	2015	37,166,033,687
15.	2016	47,888,131,742
JUMLAH		2,883,831,159,805



c) Program Dukungan Masyarakat



3. Kontribusi BOB Bumi Siak – Pertamina Hulu terhadap lifting migas nasional di 2015, 2016 dan 2017.

Secara prosentase kontribusi BOB Bumi Siak – Pertamina Hulu terhadap lifting minyak nasional adalah 2015 sebesar 1,68 %, 2016 sebesar 1,47% dan 2017 sebesar 1,35%.

Kinerja Operasi BLOK CPP

	2015		2016		2017	
	WP&B	REALISASI	WP&B	REALISASI	WP&B	REALISASI
Lifting (MBBL)	4.281	4.756	4.190	4.421	3.876	3.960
ICP (USD/BBL)	61,06	48,82	50,41	40,94	45,27	51,79
Total Expenditures (M.USD)	141.164	124.127	123.016	78.363	89.544	88.943
Net Contractor Share (M.USD)	9.432	8.360	5.821	7.787	6.578	10.891
Government Share (M.USD)	109.002	100.450	77.882	89.414	74.570	105.455
Production Cost (USD/BBL)	28,45	23,07	29,64	15,42	20,03	18,5

Lifting Minyak Nasional	2015	2016	2017
Realisasi (MBBL)	283.809	300.030	293.387

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari kondisi data dan informasi di atas serta hasil diskusi Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan seluruh mitra kerja yang hadir, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lifting BOB Bumi Siak pada tahun 2017 sebesar 11 ribu barrel per hari. Kondisi ini menurun sejak take over di tahun 2002 sebesar 40 ribu barrel per hari.
2. BOB Bumi Siak adalah merupakan join operation antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan PT Bumi Siak Pusako (BUMD dengan kepemilikan saham Provinsi Riau 50% dan Kabupaten Siak 50%) dan baru satu di Indonesia pola pengelolaan WK Migas dengan sistem BOB.
3. BOB Bumi Siak mengelola WK Migas CPP terdiri dari 3 Area yaitu Zamrud, Pedada dan West, dimana masih memiliki potensi cadangan terbukti sebesar 69 juta MBO. Dimana potensi ini berada terbesar di Area West.
4. Kontrak pengelolaan CPP ini akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2022, dengan hak prioritas kepada PT Pertamina (Persero)
5. Pada saat awal pengalihan pengelolaan WK Migas CPP dari CPI ke PT Pertamina (Persero) yang kemudian membentuk BOB Bumi Siak, disepakati adanya kesanggupan lifting minimum 60 ribu barel per hari kepada BP Migas (SKK Migas saat ini)
6. Terkait adanya keinginan Pihak Pemda Kabupaten Siak melalui anak usahanya yaitu PT Bumi Siak Pusako, untuk mendapat kesempatan mengelola kawasan CPP bersama Pertamina Hulu telah diberikan arahan oleh Deputi Pengawasan Internal SKK Migas untuk dibicarakan antara PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang hak prioritas pengelolaan WK Migas CPP dan Pemda Kabupaten Siak.
7. Berdasarkan penjelasan Dirut PT PHE bahwa untuk dapat meningkatkan lifting, BOB akan melaksanakan kegiatan eksplorasi baru ada terkendala dengan ijin penyesuaian AMDAL dari KLHK yg telah diajukan cukup lama di tahun 2015.
8. Pihak KLHK yg diwakili oleh Staf Ahli Menteri menyatakan siap memproses ijin penyesuaian AMDAL dimaksud.
9. Ketua Komisi VII DPR RI sebagai Ketua Tim Kunjungan menyampaikan bahwa dalam meningkatkan lifting di CPP, BOB bisa melakukan uji coba dari Chevron Minas dalam implementasi teknologi IOR diluar strategi investasi untuk eksplorasi

sumur baru di area CPP, dan K VII akan mengawal agar BOB Bumi Siak agar bisa menjadi Role Model dalam pengambilalihan WK Migas ke PT Pertamina (Persero) dengan melibatkan BUMD setempat.

Untuk itu maka sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja ini, perlu dilaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan :

- Kementerian LHK terkait penyelesaian ijin penyesuaian AMDAL BOB Bumi Siak – Pertamina Hulu, agar kemampuan produksi WK CPP bisa meningkat melalui pengelolaan sumur baru di West Area
- Dirjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) terkait kelanjutan pengelolaan WK CPP dengan model saat ini yang memberi kesempatan kepada PT Bumi Siak Riau – BUMD milik Pemprov Riau dan PemKab Siak, berikut konsekuensi finansial dan aspek lainnya bagi kedua belah pihak yang saat ini mengelola (PT Bumi Siak Riau dan PT Pertamina Hulu Energi) yang memungkinkan optimalisasi produksi WK CPP di masa mendatang.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau, untuk menjadi masukan dan pertimbangan Komisi VII DPR RI dalam menetapkan langkah dan tindak lanjut dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya di bidang pengawasan, legislasi, anggaran dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dapat menghantarkan kita menuju pintu gerbang kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE.AK, MM, CA